

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi merupakan transformasi mendasar dan berlangsung dengan segera yang mengubah tatanan politik, sosial, dan ekonomi sebuah masyarakat atau negara. Kerap kali, revolusi meletus akibat rasa tidak puas terhadap kondisi tidak adil, tekanan, serta krisis yang menimpa sebuah bangsa. Dalam perjalanan sejarah, revolusi telah menjadi alat untuk mewujudkan perubahan besar, yang bisa ditempuh melalui konfrontasi bersenjata ataupun aksi sosial yang bersifat damai.¹

Revolusi Nasional Indonesia merupakan periode yang ditandai oleh konfrontasi militer dan perselisihan diplomatik antara Republik Indonesia yang baru saja terbentuk dengan Kerajaan Belanda, yang mendapat dukungan dari pasukan Sekutu (khususnya Inggris). Rentetan kejadian ini diawali dengan kedatangan pertama pasukan Sekutu Inggris di Jakarta pada 29 September 1945 di bawah komando Letnan Jenderal Christison, pasca penandatanganan Civil Affairs Agreement.² Pertikaian ini berlangsung selama empat tahun hingga akhirnya Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Selama periode krusial sekitar empat tahun, dari proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, Indonesia mengalami perjuangan yang intens dan multifaset. Masa ini ditandai oleh konflik bersenjata yang sporadis namun berdarah, dengan banyak korban sipil dan penggunaan kekerasan ekstrem secara sistematis oleh pasukan militer Belanda, termasuk eksekusi singkat.

Di samping konflik militer, terjadi pula gejolak politik internal dan pergolakan komunal yang mendalam di Indonesia. Republik yang baru berdiri menghadapi faksionalisme dan perpecahan di antara berbagai kelompok politik-militer.

¹ Brinton, C. (1965). *The Anatomy of Revolution*. New York: Vintage Book,. Di akses pada 04 Desember 2024, <https://www.oerproject.com/topics/age-of-revolutions>

² Sejarah Revolusi Nasional Indonesia Tahapan Revolusi Bersendjata 1945-1950, Di akses pada 04 Desember 2024, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20393389&lokasi=lokal>

Ketidakstabilan ini diperparah oleh tekanan eksternal, termasuk dua intervensi diplomatik internasional yang signifikan. Intervensi ini terutama melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan tekanan dari Amerika Serikat, yang mengancam akan memutus bantuan Marshall Plan yang vital bagi Belanda jika mereka terus berupaya merekolonisasi Indonesia.

Kondisi sosial-politik Indonesia pasca kemerdekaan mengalami dinamika sangat kompleks. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara yang baru lahir ini, baik dari dalam maupun luar negeri. Indonesia harus kembali menghadapi serangan lanjutan dari Belanda yang masih belum menerima negara jajahannya memproklamirkan kemerdekaan. Mempertimbangkan kondisi demikian, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak cukup hanya dilakukan dengan pertempuran fisik, tetapi juga melalui berbagai strategi diplomasi.

Salah satu faktor yang mendorong Belanda menolak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah takluknya Jepang kepada pihak Sekutu. Belanda berkeyakinan memiliki legitimasi untuk kembali menduduki Nusantara, mengingat Jepang selaku otoritas pendudukan sebelumnya telah dikalahkan oleh Sekutu. Pasca penyerahan Jepang kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945, Jepang diamanatkan untuk memelihara status quo atas Indonesia. Ketentuan status quo tersebut mengharuskan Jepang untuk mencegah terjadinya alterasi dalam tatanan politik dan pemerintahan Indonesia, yang secara implisit berarti menghalangi tercapainya kemerdekaan. Berlandaskan premis tersebut, Belanda menilai proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak sah.³ Berdasarkan Civil Affairs Agreement, pada 24 Agustus 1945 pihak Inggris dan Belanda menyetujui kesepakatan untuk mengkolonialisasi kembali Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas NICA yang membonceng pasukan Sekutu dan semakin nyata ancaman terhadap kedaulatan RI, kebutuhan akan sebuah angkatan bersenjata yang lebih terorganisir dan kapabel untuk bertempur menjadi sangat mendesak.

Mengingat situasi konflik yang persisten, pemerintah Indonesia mengambil

³ Kompas, Alasan Belanda Tidak Mengakui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di Akses pada 04 Desember 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/10/170000679/alasan-belanda-tidak-mengakui-kemerdekaan-indonesia-17-agustus-1945>.

kesimpulan bahwa resolusi konflik harus dicapai melalui upaya diplomatik. Perjanjian gencatan senjata yang dihasilkan membawa implikasi yang cukup besar bagi sistem pertahanan Indonesia. Para tokoh pemimpin Republik Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Amir Syarifudin, bersepakat bahwa perjuangan dengan menggunakan diplomasi adalah suatu cara yang elegan dan menjaga martabat bangsa dalam usaha mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.⁴

Pertemuan diplomatik merupakan sebuah forum khas di mana para representasi negara berdialog mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan kolektif. Forum ini dicirikan oleh formalitas tinggi dan kepatuhan pada protokol yang rigid, baik dalam proses perundingan maupun dalam perumusan kesepakatan akhir. Oleh karena itu, para delegasi memikul tanggung jawab yang signifikan karena keputusan mereka berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak.⁵

Diplomasi, sebagai instrumen vital dalam hubungan internasional, pada dasarnya bertujuan untuk mengamankan dan memaksimalkan keuntungan nasional suatu negara di panggung global. Keuntungan ini bersifat multidimensional, mencakup berbagai aspek krusial yang menopang kedaulatan, kesejahteraan, dan pengaruh suatu bangsa.⁶

Untuk menjaga stabilitas dan harmoni global, negara-negara harus memprioritaskan diplomasi sebagai metode utama dalam menyelesaikan sengketa dan konflik. Melalui proses diplomatik, pihak-pihak yang bertikai berupaya melakukan negosiasi dan mencapai kompromi, dengan tujuan menemukan solusi damai yang dapat mencegah eskalasi menjadi konflik bersenjata.

Selama rentang waktu empat tahun yang krusial, dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan penuh pada akhir tahun 1949, berlangsung serangkaian perundingan yang kompleks dan penuh ketegangan antara Republik Indonesia yang baru berdiri dan Kerajaan Belanda. Perundingan ini secara fundamental bertujuan untuk menentukan mekanisme dan syarat-syarat dekolonisasi, sebuah proses yang tidak terhindarkan namun dipenuhi

⁴ A.P.Bimantara, perjuangan diplomasi dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Masa Revolusi (1946-1949). hal. 6.

⁵ A.B. Lopian & P.J. Drooglever, Menelusuri Jalur Linggarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 9.

⁶ Irawan, Sejarah Diplomasi Indonesia, (Klaten: Penerbit Cempaka, 2008), Hlm 40.

dengan konflik..⁷

Meskipun delegasi dari Republik Indonesia dan Belanda seringkali berhasil mencapai kesepakatan dalam berbagai perundingan mengenai dekolonisasi antara tahun 1945 dan 1949, implementasi dari persetujuan-persetujuan ini selalu terhambat oleh penolakan dan keberatan yang kuat dari berbagai pihak. Di pihak Indonesia, oposisi terhadap hasil perundingan seringkali datang dari faksi-faksi politik yang lebih radikal, terutama golongan sayap kiri, yang menilai perjanjian tersebut merugikan dan tidak sesuai dengan aspirasi nasional untuk kemerdekaan penuh.⁸

Diplomasi yang dijalankan Indonesia pada periode 1946-1949 memiliki dua tujuan utama yang saling terkait: menciptakan perdamaian di masa transisi kekuasaan dari kolonialisme ke kemerdekaan penuh, serta mendapatkan dukungan internasional yang krusial bagi keberlangsungan negara Indonesia yang baru merdeka. Perjuangan melalui jalur diplomatik oleh para pemimpin bangsa, seperti yang dilakukan dalam berbagai perundingan dengan Belanda, memiliki dampak yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada kurun waktu 1946-1949. Di tengah agresi militer Belanda yang berulang dan upaya blokade ekonomi, diplomasi menjadi garis pertahanan non-militer yang strategis.⁹

Setelah Belanda melancarkan dua agresi militer terhadap Indonesia, PBB memainkan peran penting dalam menengahi konflik ini. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang mendorong penghentian permusuhan dan memfasilitasi perundingan seperti Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Melalui mediasi internasional, diplomasi menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan menghindari perang berkepanjangan.

Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949 merupakan bukti konkret bahwa negosiasi multilateral, dengan tekanan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, mampu memaksa Belanda mengakui kedaulatan

⁷ A.B. Lopian & P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Lingkarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 1.

⁸ A.B. Lopian & P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Lingkarjati Diplomasi dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 2.

⁹ Kahin, G. M. (1952), *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, Di akses 05 Desember 2024, <https://archive.org/details/nationalismrevol0000kahi/page/n5/mode/2up>

Indonesia. Situasi ini mencerminkan bagaimana hubungan internasional dapat ditentukan oleh diplomasi yang kuat dan dukungan global.¹⁰

Dalam konteks pendidikan diplomatik, kasus ini sering dipelajari sebagai contoh bagaimana kombinasi diplomasi bilateral, multilateral, dan tekanan internasional dapat menghasilkan solusi damai dalam konflik yang berkepanjangan. Pengalaman ini juga menjadi pelajaran tentang pentingnya kerja sama internasional dan pentingnya memiliki representasi kuat dalam forum global seperti PBB.¹¹

Kajian mengenai hubungan diplomatik Indonesia-Belanda pada periode revolusi kemerdekaan menawarkan wawasan signifikan bagi studi diplomasi global. Konflik tersebut mengilustrasikan bagaimana intervensi komunitas internasional, baik melalui tekanan maupun mediasi multilateral, mampu menjadi faktor penentu dalam proses resolusi sebuah sengketa antarnegara.

Mengkaji diplomasi antara Indonesia dan Belanda pada masa revolusi 1945-1949 menawarkan pemahaman yang mendalam dan multidimensional, jauh melampaui sekadar catatan peristiwa sejarah. Periode krusial ini berfungsi sebagai laboratorium tempat lahirnya politik luar negeri Indonesia, di mana para pendiri bangsa merintis prinsip diplomasi yang kelak menjadi dasar kebijakan "bebas aktif" sebagai respons atas tekanan geopolitik global.

Proses pembentukan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam sebuah interaksi dinamis antara perjuangan bersenjata di medan perang dan perundingan di meja diplomasi, di mana setiap peristiwa militer secara langsung memengaruhi posisi tawar. Lebih jauh lagi, perjuangan ini berhasil ditarik ke panggung global, tempat legitimasi internasional menjadi kunci. Para diplomat Indonesia dengan cerdas memanfaatkan tekanan dari dunia internasional dan mediasi PBB untuk mengimbangi kekuatan militer Belanda, menunjukkan evolusi taktik negosiasi yang luar biasa dari posisi lemah hingga mencapai pengakuan

¹⁰ Elson, R. E. (2001). *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge University Press, Di Akses pada 26 Desember 2024, [https://www.google.co.id/books/edition/A_History_of_Southeast_Asia/2TRPCAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Elson,+R.+E.+\(2001\).+The+Idea+of+Indonesia:+A+History.+Cambridge+University+Press.&pg=PA425&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/A_History_of_Southeast_Asia/2TRPCAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Elson,+R.+E.+(2001).+The+Idea+of+Indonesia:+A+History.+Cambridge+University+Press.&pg=PA425&printsec=frontcover)

¹¹ Elson, R. E. (2001). *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge University Press, Di Akses pada 26 Desember 2024, [https://www.google.co.id/books/edition/A_History_of_Southeast_Asia/2TRPCAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Elson,+R.+E.+\(2001\).+The+Idea+of+Indonesia:+A+History.+Cambridge+University+Press.&pg=PA425&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/A_History_of_Southeast_Asia/2TRPCAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Elson,+R.+E.+(2001).+The+Idea+of+Indonesia:+A+History.+Cambridge+University+Press.&pg=PA425&printsec=frontcover)

kedaulatan.

Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda dan dunia internasional adalah inti dari dinamika diplomatik saat itu. Perundingan-perundingan seperti Linggarjati, Renville, Roem-Royen, hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) menunjukkan bahwa meskipun perang fisik terjadi, jalur diplomasi tetap krusial untuk mencapai tujuan politik. Indonesia berhasil memanfaatkan forum internasional seperti PBB untuk mendapatkan dukungan dan tekanan terhadap Belanda. Menjadi pelajaran fundamental tentang pentingnya diplomasi sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan konflik dan mencapai kepentingan nasional. Negara-negara, termasuk Indonesia, harus terus memperkuat kapasitas diplomatiknya, mengedepankan dialog, dan membangun koalisi internasional untuk menghadapi tantangan global, seperti krisis iklim, pandemi, atau konflik antarnegara. Pengakuan kedaulatan yang diperoleh melalui diplomasi juga menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional.

Hubungan masa lalu antara Indonesia dan Belanda diwarnai oleh kolonialisme dan kekerasan. Bahkan setelah kemerdekaan, "memori masa lalu menghambat hubungan bilateral seiring dengan berjalannya waktu," sebagaimana disebutkan dalam salah satu sumber. Namun, ada juga upaya untuk memahami sejarah bersama dari kedua belah pihak. Dinamika ini menyoroti pentingnya manajemen memori kolektif. Bagi Indonesia, ini adalah tentang merawat ingatan akan perjuangan kemerdekaan dan menegaskan identitas nasional. Bagi Belanda, ini adalah tentang mengakui masa lalu kolonialnya, termasuk kekerasan yang terjadi. Proses rekonsiliasi yang jujur dan berani menghadapi kebenaran sejarah adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan setara di masa depan. Ini relevan tidak hanya bagi Indonesia-Belanda, tetapi juga bagi negara-negara lain yang memiliki sejarah kolonial atau konflik yang belum terselesaikan.

Selain peran pemerintah, peran tokoh-tokoh diplomat seperti Sjahrir dan A.K. Gani, serta dukungan dari negara-negara lain (misalnya Amerika Serikat yang mendesak Belanda), menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan melibatkan berbagai elemen. Mengajarkan bahwa diplomasi modern semakin kompleks dan melibatkan beragam aktor, termasuk organisasi internasional, masyarakat sipil,

dan bahkan opini publik global. Membangun jaringan dan mendapatkan dukungan dari komunitas internasional tetap menjadi strategi yang efektif dalam menghadapi isu-isu sensitif atau konflik.

Indonesia pada masa itu harus bersikap pragmatis dalam menghadapi tekanan dari Belanda dan mencari dukungan dari berbagai pihak. Politik luar negeri "bebas aktif" mulai terbentuk dari pengalaman ini. Hikmahnya adalah perlunya fleksibilitas dan pragmatisme dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap geopolitik, menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar, dan senantiasa mengutamakan kepentingan nasional tanpa terikat pada blok tertentu.

Berbagai perundingan menunjukkan bahwa dalam situasi konflik, negosiasi dan kompromi seringkali diperlukan untuk mencapai solusi, meskipun tidak selalu ideal. Contohnya adalah isu Irian Barat yang tidak tuntas dalam KMB, yang menjadi sumber masalah di kemudian hari.¹² Kemampuan untuk bernegosiasi secara efektif, memahami posisi lawan, dan mencari titik temu adalah keterampilan diplomatik yang krusial. Ini penting dalam mengatasi sengketa bilateral maupun multilateral, serta dalam membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Pada hakikatnya, seluruh rangkaian diplomasi ini merupakan pertarungan visi fundamental antara gagasan negara kesatuan yang merdeka dan upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya melalui struktur federal. Oleh karena itu, kajian atas era ini memberikan pelajaran abadi tentang seni diplomasi, sinergi kekuatan militer dan perundingan, serta peran komunitas global dalam resolusi konflik. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **DINAMIKA HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA DENGAN BELANDA PADA MASA REVOLUSI TAHUN 1945-1949.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, agar pembahasan penulis lebih jelas dan terstruktur secara sistematis, maka penulis merangkai rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

¹² Gea, Y.A., & Subaryana. (2022). Konferensi Meja Bundar dan Pengaruhnya terhadap Eksistensi Kemerdekaan Indonesia. *TJANTRIK: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 1(1).

1. Bagaimana kondisi Sosial Politik Indonesia Pasca Kemerdekaan dan respon Belanda Terhadap Kemerdekaan Indonesia?
2. Bagaimana Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Belanda Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Belanda Pada Masa revolusi tahun 1945-1949. Namun, secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang di sebutkan dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian ini adalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi Sosial Politik Indonesia Pasca Kemerdekaan dan respon Belanda Terhadap Kemerdekaan Indonesia
2. Untuk Mengetahui Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Belanda Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949.

D. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian, penting untuk mempelajari dan memahami riset-riset terdahulu yang relevan. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal dan bahan perbandingan yang berguna untuk topik penelitian yang sedang digarap. Dengan demikian, penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi penting dan acuan umum bagi peneliti, apalagi karena ada beberapa studi sebelumnya yang topiknya mirip. Adapun penelitian terdahulu yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Alfidatu Panji Bimantara berjudul perjuangan diplomasi dalam Proses perundingan yang terjadi antara tahun 1946 hingga 1949 merupakan fokus utama dalam skripsi ini, yang dibahas dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sama-sama menggunakan metode sejarah. Namun dengan kajian yang berbeda, skripsi ini berfokus terhadap diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan penulis mengkaji Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Belanda pada Masa Revolusi 1945-1949 serta sudut pandang dari

beberapa pihak terkait dan hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa itu untuk kondisi masa kini dan yang akan datang.

2. Skripsi Abdul Majid berjudul Perjuangan jalur Diplomasi: Sejarah perundingan Linggarjati (1946-1949)

Skripsi ini membahas salah satu perundingan Indonesia-Belanda pada Masa revolusi. Namun kajian penulis berfokus terhadap pandangan pihak-pihak yang terkait dalam hubungan diplomatik Indonesia-Belanda pada masa Revolusi serta sudut pandang dari beberapa pihak terkait dan hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa itu untuk kondisi masa kini dan yang akan datang.

3. Buku Diplomasi Ujung Tombak Perjuangan RI, oleh Muhammad Roem, 1989.

Buku ini membahas peran penting diplomasi pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah jalur yang menjadi pilihan utama para pemimpin bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan menyelesaikan konflik. Secara khusus, penulis mengkaji dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda selama periode revolusi. Sedangkan penulis mengkaji berbagai sudut pandang dari pihak-pihak terkait terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi serta sudut pandang dari beberapa pihak terkait dan hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa itu untuk kondisi masa kini dan yang akan datang.

4. Jurnal Dinamika Diplomasi Indonesia yang Merefleksikan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Tahun 1945-1949. Oleh Tabriz.

Jurnal ini membahas diplomasi Indonesia pada awal kemerdekaan dalam rangka memperoleh pengakuan kedaulatan internasional. Beralih ke sisi lain, muncul pula gagasan politik luar negeri bebas aktif dari Mohammad Hatta. Pada tahun 1945-1949, Indonesia mencoba merefleksikan diplomasi yang sejalan dengan politik luar negeri. Jurnal ini berfokus pada politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan penulis berfokus pada dinamika hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda pada masa Revolusi serta sudut pandang dari beberapa pihak terkait dan hikmah dari peristiwa yang terjadi

pada masa itu untuk kondisi masa kini dan yang akan datang.

5. Buku *The Indonesian Revolution and the Dutch: 1945-1949*, oleh J.A. de Moor dan Klaas van Dijk.

Buku ini membahas dari sudut pandang Belanda, termasuk bagaimana pemerintahan Belanda merespons klaim kemerdekaan Indonesia. Buku ini menjadi rujukan penulis serta memiliki kajian yang persis dan sangat relevan dengan yang penulis teliti. Adapun perbedaannya adalah kajian yang diteliti penulis lebih cenderung berfokus berbagai sudut pandang dalam diplomasi Indonesia-Belanda pada masa revolusi serta sudut pandang dari beberapa pihak terkait dan hikmah dari peristiwa yang terjadi pada masa itu untuk kondisi masa kini dan yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini secara mendasar menggunakan metode penelitian sejarah sebagai landasan metodologisnya. Metode sejarah dapat dipahami sebagai suatu prosedur kerja yang terstruktur yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang masa lampau. Fokus utamanya adalah pada analisis kritis terhadap berbagai bentuk rekaman sejarah dan peninggalan fisik yang ada. Ini berarti peneliti tidak serta-merta menerima sumber sejarah sebagai kebenaran mutlak. Sebaliknya, setiap sumber, baik primer maupun sekunder, akan melalui proses pengujian yang teliti untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya. Analisis kritis ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi bias penulis sumber, tujuan pembuatan rekaman tersebut, serta konteks sosial-politik yang melingkupinya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk melampaui narasi permukaan dan membongkar makna yang lebih dalam, sehingga mampu menyajikan sebuah rekonstruksi masa lalu yang kaya, berimbang, dan didasarkan pada bukti-bukti yang telah diuji secara saksama.¹³ Metode penelitian sejarah terdiri dari beberapa tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.¹⁴

1. Heuristik

Istilah 'heuristik' diadopsi dari bahasa Yunani, *heuriskein*, yang bermakna

¹³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 2015), Hlm 49.

¹⁴ Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung: Satyahistorika, 2020), hlm 30.

'mencari atau menemukan'. Dalam konteks penelitian sejarah, heuristik merujuk pada tahapan fundamental berupa pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.¹⁵

Sebagai langkah pembuka dalam penelitian sejarah, proses heuristik adalah aktivitas untuk mencari dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik. Tujuannya adalah membangun koleksi sumber yang lengkap dan kaya, sehingga menjadi landasan yang kuat untuk sebuah penelitian yang komprehensif.¹⁶ Metodologi sejarah melibatkan transformasi jejak masa lalu menjadi narasi yang terstruktur melalui tiga tingkatan konsep:

Sumber Sejarah: Merupakan bahan mentah penelitian, yaitu semua peninggalan masa lalu yang mengandung informasi. Sumber dibedakan berdasarkan asalnya (primer dari pelaku/zaman yang sama, dan sekunder dari pihak luar/zaman setelahnya) serta wujudnya (tertulis, lisan, dan benda/artefak).

Data Sejarah: Adalah konten informasi spesifik yang diekstrak dari sumber sejarah. Jika sumber adalah buku, maka data adalah isi teks di dalamnya.

Fakta Sejarah: Merupakan hasil akhir dari proses analisis, di mana data telah diseleksi, dikritik, dan diinterpretasikan oleh sejarawan. Fakta ini mencakup dimensi mental (kondisi kejiwaan atau pemikiran) dan sosial (konteks kemasyarakatan yang melingkupi peristiwa).¹⁷

Pada tahap heuristik penelitian ini, dilakukan proses pencarian dan penemuan untuk mendapatkan berbagai sumber sejarah yang berkaitan, baik sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Belanda pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber primer sebagai berikut:

- a. Sumber Arsip dan Dokumen
 - 1) Teks Proklamasi (1945)
 - 2) Arsip Perjanjian Linggardjati (1946)
 - 3) Arsip Perjanjian Renville (1947)
 - 4) Arsip Perjanjian Roem-Royen (1949)
 - 5) Arsip Konferensi Meja Bundar (1949)

¹⁵ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*, (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hlm 145-146.

¹⁶ Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung: Satyahistorika, 2020). Hlm 31.

¹⁷ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*, (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hlm 145-146.

- 6) Dokumen Nota van Beel (1946)
 - 7) Laporan KTN (1947-1949)
- b. Sumber Koran
- 1) Surat Kabar NRC Handelsblad (1947)
 - 2) Surat Kabar Helmond (1948)
 - 3) Aaltensche Courant (1949)
 - 4) Surat Kabar Leeuwarder Courant (1949)
- c. Sumber Audio Visual
- 1) Foto Pembacaan Teks Proklamasi
 - 2) Foto Perundingan Linggardjati
 - 3) Foto Perundingan Renville
 - 4) Foto Perundingan Roem-Royen
 - 5) Foto Perundingan Konferensi Meja Bunda

2. Kritik

ini menjelaskan proses verifikasi dalam metodologi sejarah, yang merupakan tahap lanjutan dari heuristik. Setelah sumber-sumber sejarah berhasil dikumpulkan, diperlukan suatu proses pengujian melalui kritik untuk memastikan validitasnya sebagai dasar rekonstruksi peristiwa masa lalu. Data sejarah yang telah melewati proses kritik, baik secara internal maupun eksternal, akan bertransformasi menjadi fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Data historis akan memperoleh status sebagai fakta sejarah dan dapat dilanjutkan ke tahap interpretasi hanya setelah melalui proses verifikasi yang ketat. Proses verifikasi atau kritik sumber ini terdiri dari dua tahapan fundamental.

Kritik Eksternal, yang bertujuan untuk mengevaluasi autentisitas sumber. Evaluasi ini berfokus pada aspek-aspek ekstrinsik, seperti material, gaya penulisan, dan provenans (asal-usul) untuk memastikan sumber tersebut genuin dan bukan turunan atau falsifikasi.

Kritik Internal, yang dilakukan setelah autentisitas sumber terverifikasi. Tahap ini berfokus pada evaluasi kredibilitas konten atau isi sumber. Reliabilitas informasi diuji dengan mempertanyakan kebenarannya, yang memerlukan analisis terhadap

¹⁸ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 102.

kompetensi dan integritas penulis, termasuk bias personal, kapasitas memori, serta kedekatan temporal dan spasialnya dengan peristiwa yang dilaporkan.

Di samping sumber tekstual berupa dokumen, penelitian sejarah juga memanfaatkan sumber lisan yang proses verifikasiya menuntut syarat-syarat spesifik. Validitas sumber lisan, seperti tradisi lisan atau kesaksian mengenai suatu peristiwa, perlu diperkuat melalui jejak kesaksian yang berantai (rantai saksi) hingga ke informan primer.

Salah satu teknik verifikasiya adalah dengan melakukan konfrontasi antar saksi dalam satu forum untuk menguji konsistensi dan mengidentifikasi potensi kebohongan. Lebih jauh lagi, untuk menilai kredibilitas narasumber, dapat dilibatkan pakar di bidang komunikasi atau psikologi. Para ahli ini memiliki kompetensi untuk mendeteksi kebohongan dengan menganalisis isyarat verbal dan non-verbal, seperti mimik, kontak mata, dan intonasi vokal, yang ditampilkan narasumber selama proses wawancara kesaksian sejarah. Mungkin teknik wawancara dan melihat gerak tubuh serta mimik muka dan gerakan mata bisa dipelajari oleh peneliti sejarah.¹⁹

Kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah melewati kritik sumber (verifikasi) akan mengangkat statusnya menjadi fakta sejarah yang sah. Kumpulan fakta inilah yang menjadi fondasi bagi sejarawan untuk melanjutkan ke tahap penafsiran atau interpretasi historis.²⁰

Kritik Intern

Kritik intern adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai isi atau konten dari suatu dokumen atau sumber sejarah guna menentukan kredibilitas, dan interpretasi yang tepat dari informasi yang terkandung di dalamnya. Beberapa aspek yang diperiksa dalam kritik intern meliputi:

1. Penulis atau sumber informasi: mengidentifikasi siapa penulis dokumen dan menilai kredibilitas serta tujuan penulisannya.
2. Konteks historis: memahami latar belakang sejarah saat dokumen tersebut dibuat untuk menilai relevansi dan konteksnya.
3. Tujuan: menganalisis tujuan penulisan dan potensi bias yang mungkin

¹⁹ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*, (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hlm 146.

²⁰ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*, (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hlm 147.

ada dalam dokumen tersebut.

4. Konsistensi dan koherensi: memeriksa apakah informasi dalam dokumen konsisten dan logis.
5. Perbandingan dengan sumber lain: membandingkan informasi dalam dokumen dengan sumber lain untuk melihat kesesuaian dan kontradiksi.
6. Bahasa dan gaya penulisan: menganalisis penggunaan bahasa dan gaya penulisan untuk memahami maksud dan nuansa yang mungkin tersembunyi.

Pentingnya kritik internal dalam riset sejarah terletak pada dua hal utama: pertama, ia membantu peneliti memperoleh data yang valid dan bisa diandalkan, dan kedua, ia menjadi alat bagi peneliti untuk menjaga objektivitas dan mencegah pengaruh bias pribadi. Hasil dari kritik intern terhadap sumber-sumber primer yang digunakan penulis seperti berikut:

1. Teks Proklamasi 1945. Berisi tentang pernyataan yang menandakan lahirnya negara Indonesia yang merdeka. Walaupun sangat singkat, teks ini memiliki makna yang mendalam dan menjadi simbol dari kemenangan perjuangan bangsa Indonesia. Teks ini tidak hanya mencerminkan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi titik awal bagi perjalanan negara yang baru merdeka menuju pembangunan dan pengakuan internasional.
2. Arsip Perjanjian Linggardjati 1946. Perjanjian ini bertujuan untuk mengakhiri ketegangan dan konflik pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 serta mengatur hubungan antara Indonesia dan Belanda setelah Agresi Militer Belanda I. Perjanjian Linggardjati sangat penting dalam sejarah diplomasi Indonesia karena menjadi langkah pertama menuju pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, meskipun masih banyak ketentuan yang merugikan Indonesia.
3. Arsip Perjanjian Renville 1947. Isi Perjanjian Renville bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda pasca-agresi militer Belanda (Agresi Militer Belanda I) dan memperjelas

pengaturan status wilayah yang masih diperebutkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

4. Arsip Perjanjian Roem-Royen 1949. Isi perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan Agresi Militer Belanda II. Perjanjian ini menjadi bagian dari proses diplomasi yang lebih besar yang mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
5. Arsip Konferensi Meja Bundar 1949. Isi dari arsip ini untuk menyelesaikan masalah politik dan hukum antara Indonesia dan Belanda setelah perjuangan Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari perjanjian-perjanjian sebelumnya, seperti Perjanjian Roem-Royen (1949), yang mengarah pada pengakuan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia oleh Belanda.

Kritik Ekstern

Kritik ekstern adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai keaslian dan keabsahan suatu dokumen atau sumber sejarah dengan memeriksa faktor-faktor luar dokumen tersebut. Kritik eksternal bertujuan untuk memverifikasi otentisitas atau keaslian fisik sumber, yaitu untuk memastikan apakah sumber tersebut valid, asli, bukan tiruan, dan masih utuh. Proses ini menguji aspek-aspek "luar" dari sebuah sumber. Sementara itu, kritik internal berfokus pada penyelidikan isi (substansi) sumber, khususnya dengan menguji objektivitas dan kredibilitas informasi untuk melihat apakah ada bias atau kepentingan pribadi dari penulisnya.²¹

Kritik eksternal adalah langkah fundamental dalam metode penelitian sejarah, karena tujuannya adalah untuk memastikan keaslian atau otentisitas sumber. Penggunaan sumber-sumber yang telah terverifikasi keasliannya ini kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menyusun sebuah karya sejarah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

²¹ W.J. Sukmana. *Metode Penelitian Sejarah: Dari Riset Hingga Penulisan* (Seri Publikasi Pembelajaran, 2021), hlm.1.

Dengan melakukan kritik ekstern, penulis dapat menentukan apakah suatu dokumen dapat dipercaya dan digunakan sebagai sumber yang valid dalam penelitian sejarah atau akademik lainnya. Hasil dari kritik ekstern ialah seperti berikut:

- A. Teks proklamasi 1945. Arsip ini ditemukan penulis secara online melalui laman website ANRI pada tanggal 02 Desember 2024. Kondisi Arsip masih terjaga melalui proses digitalisasi. Kondisi Arsip berwarna coklat karena termakan usia. Arsip tersebut merupakan hasil scanning tanpa perubahan warna digital. Sumber ini layak digunakan dan relevan dengan kajian penelitian penulis.
- B. Arsip Perjanjian Linggardjati 1946. Arsip ini ditemukan penulis secara online melalui laman website ANRI pada tanggal 02 Desember 2024. Kondisi Arsip masih terjaga melalui proses digitalisasi. Kondisi Arsip berwarna coklat karena termakan usia. Arsip tersebut merupakan hasil scanning tanpa perubahan warna digital. Sumber ini layak digunakan dan relevan dengan kajian penelitian penulis.
- C. Arsip Perjanjian Renville 1947. Arsip ini ditemukan penulis secara online melalui laman website ANRI pada tanggal 02 Desember 2024. Kondisi Arsip masih terjaga melalui proses digitalisasi. Kondisi Arsip berwarna coklat karena termakan usia. Arsip tersebut merupakan hasil Foto Terjadi perubahan warna digital menjadi hitam putih. Sumber ini layak digunakan dan relevan dengan kajian penelitian penulis.
- D. Arsip Perjanjian Roem-Royen 1949. Arsip ini ditemukan penulis secara online melalui laman website ANRI pada tanggal 02 Desember 2024. Kondisi Arsip masih terjaga melalui proses digitalisasi. Kondisi Arsip berwarna coklat karena termakan usia. Arsip tersebut merupakan hasil scanning tanpa perubahan warna digital. Sumber ini layak digunakan dan relevan dengan kajian penelitian penulis.
- E. Arsip Konferensi Meja Bundar 1949. Arsip ini ditemukan penulis secara online melalui laman website ANRI pada tanggal 02 Desember 2024. Kondisi Arsip masih terjaga melalui proses digitalisasi. Kondisi

Arsip berwarna coklat karena termakan usia. Arsip tersebut merupakan hasil scanning tanpa perubahan warna digital. Sumber ini layak digunakan dan relevan dengan kajian penelitian penulis.

3. Interpretasi

Sebagai tahapan lanjutan dari verifikasi (kritik), interpretasi terbagi menjadi dua proses intelektual: analisis dan sintesis. Analisis melibatkan dekonstruksi atau penguraian fakta-fakta sejarah untuk mendapatkan eksplanasi, yang dilakukan dengan memanfaatkan kerangka ilmu-ilmu sosial untuk peristiwa sejarah atau menggunakan pendekatan hermeneutika untuk studi biografis. Selanjutnya, sintesis adalah proses menyatukan kembali seluruh fakta yang telah dianalisis. Berdasarkan landasan teoretis yang dipilih sesuai topik kajian, fakta-fakta tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu interpretasi historiografis yang menyeluruh.

Sejarawan biasanya menggunakan lima jenis pendekatan dalam menafsirkan sejarah:

Interpretasi Verbal: Fokus pada analisis bahasa dalam sumber, seperti makna kata, tata bahasa, konteks kalimat, dan keakuratan terjemahan.

Interpretasi Teknis: Menyelidiki tujuan asli mengapa sebuah dokumen dibuat dan menganalisis bentuk spesifik dari tulisan tersebut.

Interpretasi Logis: Memastikan seluruh penjelasan sejarah dibangun di atas alur berpikir yang runtut dan masuk akal, sehingga gagasannya koheren.

Interpretasi Psikologis: Mencoba memahami kondisi kejiwaan dan motivasi pribadi dari para tokoh sejarah. Contohnya, memahami bahwa tindakan kejam Hitler terhadap kaum Yahudi tidak hanya didorong alasan politik, tetapi juga oleh kebencian personal yang berakar dari pengalaman masa lalunya.

Interpretasi Faktual: Berusaha menyajikan fakta secara objektif dan membiarkan rangkaian peristiwa "bercerita sendiri" tanpa analisis mendalam, mirip dengan gaya penulisan sejarah naratif.²²

Dalam interpretasi pada bahasan ini penulis menggunakan pendekatan teori Negosiasi oleh Roger Fisher. Dalam gagasannya menekankan sebuah kerangka

²² Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*, (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hlm 147-148.

kerja transformatif yang dikenal sebagai Negosiasi Berprinsip, yang dirancang untuk menggantikan metode tawar-menawar posisi yang sering kali tidak efisien dan merusak hubungan. Inti dari pendekatan ini adalah pergeseran fundamental dari perdebatan kaku mengenai posisi apa yang masing-masing pihak katakan mereka inginkan menuju eksplorasi kepentingan yang lebih dalam, yaitu alasan dan motivasi di balik posisi tersebut. Untuk mencapai hal ini, metode mereka menuntut para negosiator untuk terlebih dahulu memisahkan antara persoalan manusia dengan masalah substansial yang dibahas, sehingga emosi dan persepsi tidak menghalangi solusi, kemudian secara kreatif menciptakan berbagai pilihan solusi yang dapat memberikan keuntungan bersama, alih-alih terjebak dalam pola pikir menang-kalah. Selanjutnya, agar kesepakatan yang dicapai terasa adil dan kokoh, perundingan didasarkan pada penggunaan kriteria objektif seperti standar pasar atau hukum sehingga hasilnya ditentukan oleh prinsip yang adil, bukan oleh siapa yang lebih keras menekan. Seluruh proses ini diperkuat oleh konsep strategis BATNA, atau Alternatif Terbaik dari Kesepakatan yang Dirundingkan, yang berfungsi sebagai jaring pengaman dan sumber kekuatan bagi setiap pihak untuk mengetahui kapan harus meninggalkan perundingan dan tidak menerima kesepakatan yang merugikan. Secara keseluruhan, sintesis dari prinsip-prinsip ini mengubah negosiasi dari sebuah konfrontasi menjadi proses pemecahan masalah kolaboratif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang bijaksana, efisien, dan mampu menjaga hubungan baik antarpihak.²³

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Belanda pada periode 1945- 1949, selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia, teori negosiasi tercermin dalam berbagai upaya perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda, sering kali dengan mediasi dari negara lain atau organisasi internasional. Teori ini menjelaskan bagaimana Indonesia, yang awalnya merupakan bagian dari sistem kolonial Belanda, berusaha keluar dari sistem tersebut melalui diplomasi dan bergabung dengan negara-negara yang lebih merdeka atau memiliki kekuatan politik yang lebih besar di dunia pasca- Perang Dunia II.

²³ Roger Fisher, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Hlm. 30.

4. Historiografi

Sebagai puncak dari penelitian sejarah, tahap historiografi atau penulisan karya dilakukan setelah interpretasi atas fakta-fakta dirampungkan. Terdapat beberapa moda penyajian. Deskriptif naratif menyajikan peristiwa sebagai sebuah proses yang utuh secara diakronis. Sementara itu, deskriptif analitis memberikan eksplanasi kausalitas atau mengurai struktur sosial yang mendasari suatu fenomena sejarah. Di luar itu, terdapat pendekatan alternatif seperti deskriptif geneologis Michel Foucault, yang merekonstruksi sejarah secara non-linear dengan bergerak mundur dari masa kini (present) untuk mengidentifikasi titik diskontinuitas (difference), kemudian bergerak maju untuk melacak transformasi historis dari titik tersebut.

Tahap historiografi menuntut penyajian narasi sejarah yang memadukan rigor ilmiah dengan kepekaan artistik. Tujuannya adalah agar karya sejarah, sebagai laporan penelitian, dapat dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat untuk memberikan inspirasi. Narasi yang kering dan minim imajinasi akan gagal menciptakan koneksi dengan pembaca. Oleh karena itu, sejarawan perlu memanfaatkan imajinasi untuk merekonstruksi suasana dan peristiwa masa lalu. Namun, imajinasi historis ini secara fundamental berbeda dari fiksi sastra; ia harus senantiasa berlandaskan pada interpretasi fakta secara logis dan faktual. Untuk menjaga integritas ilmiah tanpa mengorbankan keterbacaan, diperlukan penguasaan keterampilan menulis yang tinggi, pemahaman tata bahasa, serta kemampuan menyusun eksplanasi yang koheren dan mudah diakses oleh audiens.²⁴

Studi sejarah kontemporer, termasuk yang mengkaji dokumen historis keagamaan seperti riset Jalaluddin Rakhmat, mengadopsi pendekatan historiografis yang metodologis. Proses ini diawali dengan perumusan hipotesis abduktif (dikenal sebagai *inference to the best explanation*), di mana peneliti mengajukan proposisi paling plausibel berdasarkan observasi awal. Langkah selanjutnya adalah verifikasi empiris, yaitu pencarian bukti (artefak atau dokumen) untuk mengonfirmasi atau mendiskonfirmasi hipotesis tersebut. Tahap akhir melibatkan interpretasi bukti yang valid untuk menyusun sebuah teori

²⁴ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*, (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hlm 148.

historis yang koheren, yang pada gilirannya menjadi fondasi bagi rekonstruksi peristiwa. Meskipun berupaya sistematis, proses riset ini secara inheren mengandung subjektivitas, sebab interpretasi peneliti memegang peranan sentral dalam konstruksi akhir bangunan sejarahnya.²⁵

Pada tahapan ini penulis akan menggambarkan secara garis besar tentang Penulisan Penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu;

Bab 1 Pendahuluan, di dalam bab 1 ini terdapat lima sub bab diantaranya, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka dan Langkah-Langkah Penelitian.

Bab II, dalam bab dua ini membahas mengenai tentang Kondisi Sosial Politik Indonesia Pasca Kemerdekaan dan Respon Belanda terhadap Kemerdekaan Indonesia. Dalam bab ini diuraikan tentang sosial politik Indonesia Pasca Kemerdekaan Indonesia dan Respon Belanda terhadap Kemerdekaan Indonesia.

Bab III, bab ini akan membahas mengenai Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Belanda Pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949. Dalam bab ini diuraikan tentang Perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen Dan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Bab IV Penutup, bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian mengenai Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Belanda pada Masa Revolusi Tahun 1945-1949.

²⁵ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*, (Prenada Media, Jakarta, 2019). Hlm 148-149.